

■ Audit Aset Pemprov Kalbar

Yakin, 30 Hari Tidak Selesai

Yulan Mirza

Borneo Tribune, Pontianak

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti menjelaskan bahwa permasalahan aset ini diakui oleh pihak eksekutif dinilai cukup kompleks dan ini menjadi salah satu indikator catatan BPK.

Permasalahan aset ini harus dibahas lebih detail sejalan dengan hasil audit BPK. Namun, Ary berkeyakinan dan menilai masa waktu di audit oleh BPK yang nantinya akan memakan waktu selama 30 hari itu, tidak akan selesai. Karena permasalahan ini berkenaan dengan jangka wak-

tu per tahun.

"Penyelesaian masalah aset ini sebenarnya dapat dilakukan bersama-sama. Antara legislative dan BPK. Mengingat aset itu ada yang bergerak dan tidak bergerak," tutur Ary seusai sidang laporan badan anggaran terhadap Raperda pertanggungjawaban anggaran APBD tahun 2010 di gedung DPRD Kalbar, Kamis (4/8) kemarin.

Lebih lanjut Ary mengatakan aset bergerak dinilai akan mengalami penyusutan dan penurunan nilai ekonomis. Maka sebab itu, kata Ary, harus ada kesepakan bersama sejak awal. Kemudian dari hasil audit BPK ini dapat dijadikan

pembanding. Apabila kalau perlu adanya apribial. Sehingga pihak independen dapat membantu menyelesaikan permasalahan aset itu.

"Dilihat dari jangka waktu, masalah aset ini cukup kompleks. Bahkan dihalang-halangi dalam melakukan pembahasan masalah aset ini yang kini masih diaudit oleh BPK," jelasnya.

Bahkan, menurut Ary, pembahasan dan penyelesaian masalah aset ini dapat sejalan antara legislative dan BPK. "Kalau mau menggunakan apribial, silahkan memakai apribial. BPK tetap jalan. Tetapi sebenarnya di badan anggaran permasalahan

aset ini dapat dibahas. Mengingat masalah aset ini dinilai banyak kompleks," ucap legislator Partai Demokrat dapil Kota Pontianak ini.

Disinggung apa yang saja dibahas permasalahan aset, Ary menjelaskan bahwa pihak DPRD Kalbar melakukan pembahasan aset itu mengenai kesemerawutan masalah aset. Baik itu yang bergerak dan tidak bergerak. "Jadi sudah sepantasnya, permohonan 21 orang anggota dewan untuk mendorong adanya Pansus aset," tegasnya.

Ary juga menambahkan mengenai permasalahan aset ini dirinya belum mengetahui secara persis.

Mengingat dirinya belum mendapatkan laporan mengenai aset mana yang telah mengalami penyusutan, pengurangan nilai ekonomis dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.

"Dorong permasalahan aset ini bukan hanya KONI saja. Melainkan masih banyak aset lainnya yang perlu mendapatkan pembahasan. Maka dari itu, jika pemprov ingin mengejar penilaian pemeriksaan BPK itu semakin baik, maka dimulai melakukan pembenahan dari sekarang. Tidak cukup menunggu dari hasil audit BPK, baru kita melakukan pembahasan masalah aset," pungkasnya. □